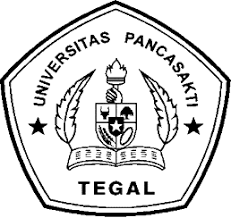
# **PEMBAGIAN HAK ROYALTI ATAS KARYA LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN PENCIPTA LAGU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ROSSALINA CITRA AYU**

**5121600171**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

# **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PEMBAGIAN HAK ROYALTI ATAS KARYA LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN PENCIPTA LAGU**

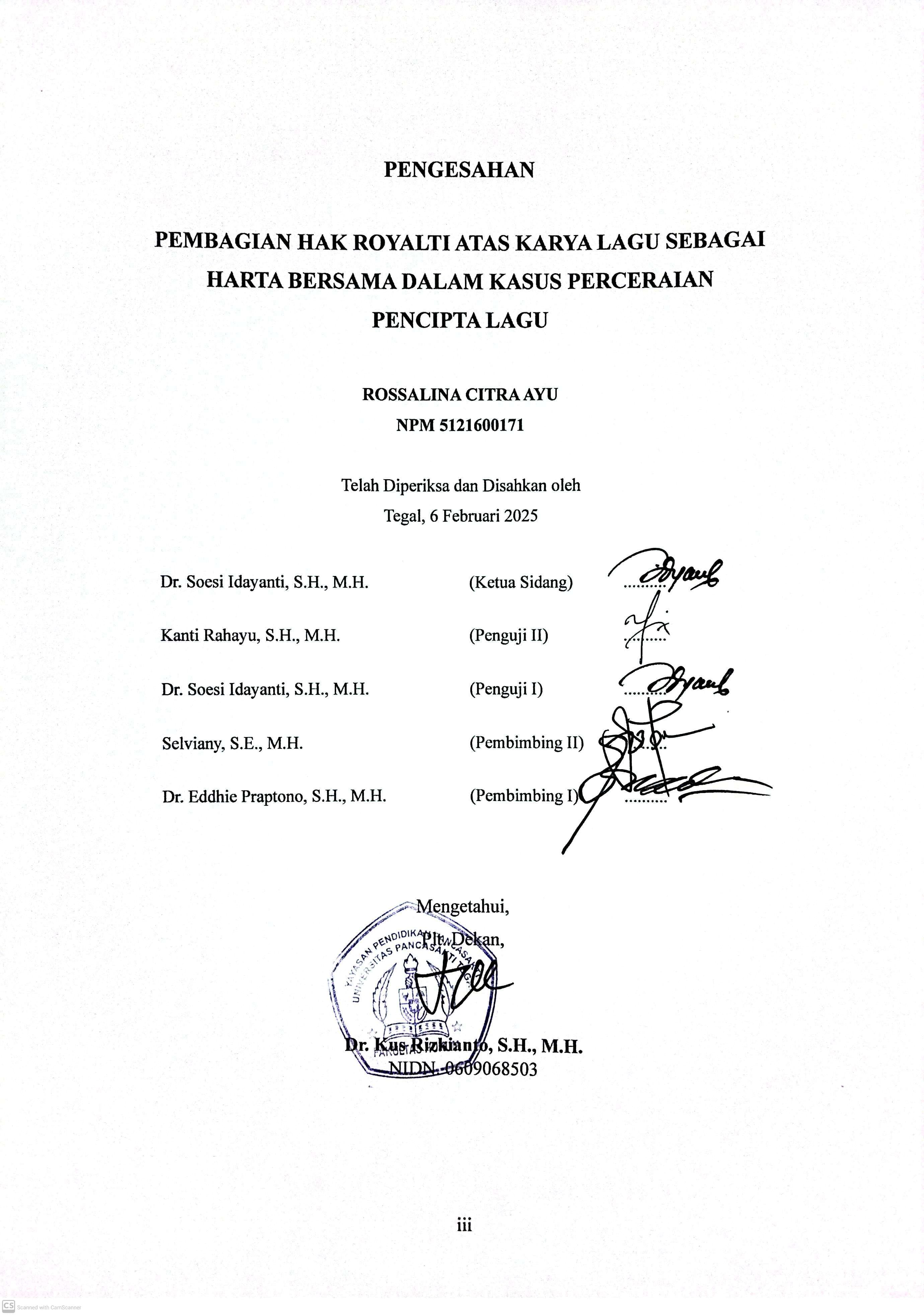
**ROSSALINA CITRA AYU**

**NPM 5121600171**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 16 Januari 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing II  **Selviany, S.E., M.H.**  NIDN. 0613107706 | Pembimbing I  **Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.**  NIDK. 8944550022 |
| Mengetahui,  Plt. Dekan,  **Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.**  NIDN. 0609068503 | |

******

# **PENGESAHAN**

**PEMBAGIAN HAK ROYALTI ATAS KARYA LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN PENCIPTA LAGU**

**ROSSALINA CITRA AYU**

**NPM 5121600171**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 6 Februari 2025

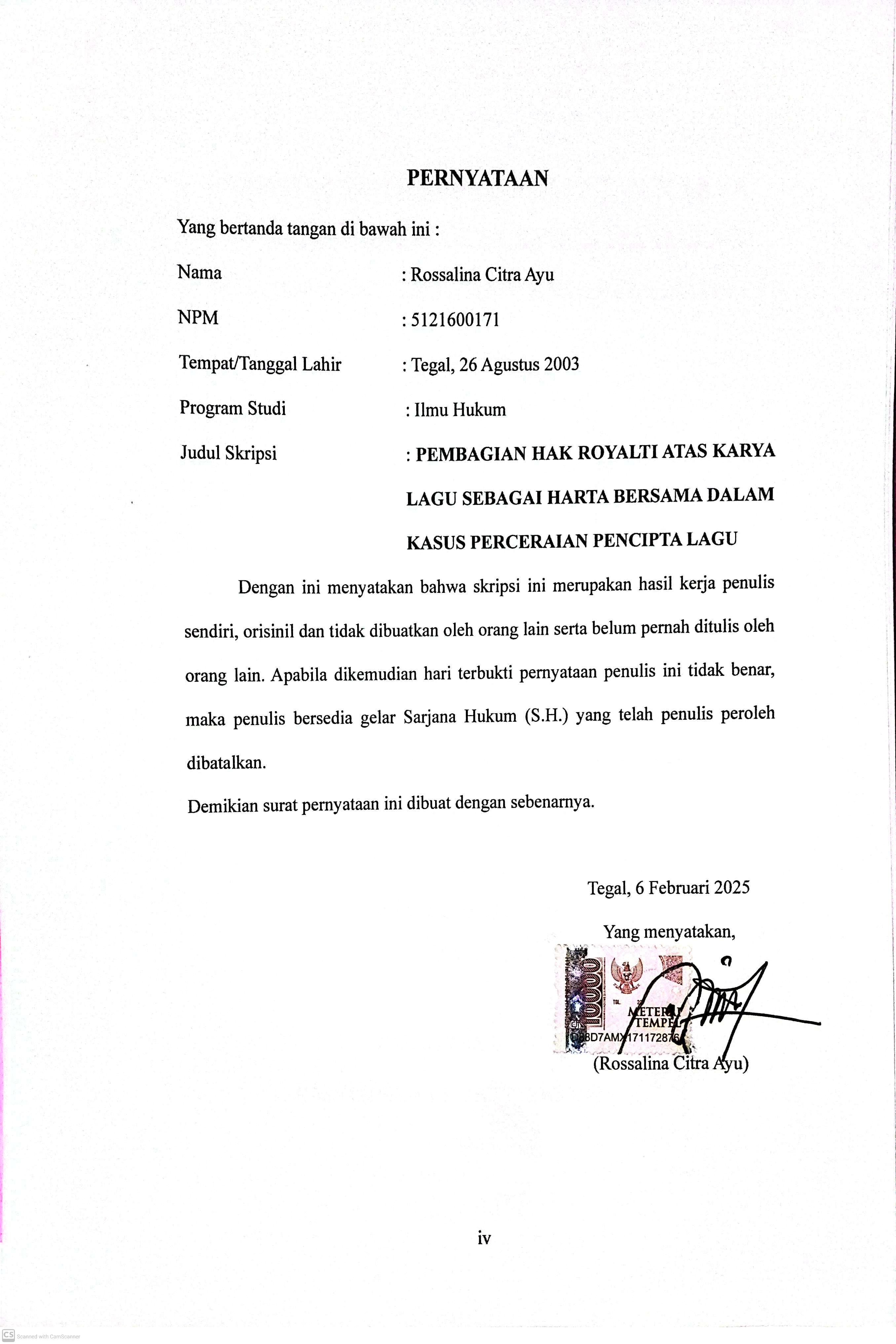
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. | (Ketua Sidang) | .......... |
| Kanti Rahayu, S.H., M.H. | (Penguji II) | .......... |
| Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. | (Penguji I) | .......... |
| Selviany, S.E., M.H. | (Pembimbing II) | .......... |
| Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H. | (Pembimbing I) | .......... |

Mengetahui,

Plt. Dekan,

**Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.**

NIDN. 0609068503

****

# **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rossalina Citra Ayu

NPM : 5121600171

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 26 Agustus 2003

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HAK ROYALTI ATAS KARYA LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN PENCIPTA LAGU**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 6 Februari 2025

Yang menyatakan,

(Rossalina Citra Ayu)

**ABSTRAK**

Kemajuan teknologi dan globalisasi memberikan dampak kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, termasuk royalti sebagai Hak Cipta. Dalam konteks perceraian, mengenai pembagian harta bersama berupa royalti, menjadi isu penting. Kasus perceraian Virgoun dan Innara Rusli menyoroti pembagian royalti lagu sebagai harta bersama.

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai hak royalti atas karya lagu sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2) Untuk mengkaji proses hukum yang dilakukan dalam pembagian hak royalti atas karya lagu antara Virgoun dan Innara setelah perceraian.

Jenis penelitian adalah kepustakaan (*library research)* dengan menggunakan pendekatan hukum normatif berupa *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus). Kemudian data penelitian yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dianilisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus sengketa royalti antara Innara Rusli dan Virgoun dapat dianggap sebagai harta bersama dan Putusan Pengadilan Agama yang memutuskan bahwa royalti dibagi 50% antara keduanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian menentukan proses penyelesaian yang seharusnya dilakukan keduanya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini menunjukkan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang benar untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa hak ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti, Harta Bersama, Proses Hukum**

***ABSTRACT***

*Advances in technology and globalization have an impact on Intellectual Property (IP) in Indonesia, including royalties as Copyright. In the context of divorce, the division of joint property in the form of royalties has become an important issue. The Virgoun and Innara Rusli divorce case highlights the division of song royalties as joint property.*

*This research aims: (1) to examine the legal arrangements regarding royalty rights to song works as joint property based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. (2) To examine the legal process carried out in the distribution of royalty rights on song works between Virgoun and Innara after divorce.*

*This type of research is library research using a normative legal approach in the form of a statute approach and case approach. Then the research data used are primary legal materials and secondary legal materials with literature study data collection methods and analyzed using qualitative methods.*

*The results of this study indicate that the royalty dispute case between Innara Rusli and Virgoun can be considered as joint property and the Religious Court Decision which decides that royalties are divided 50% between the two is in accordance with applicable regulations. Then determine the settlement process that should be done by both based on the Copyright Law. This shows the importance of following the correct legal procedures to ensure justice in the settlement of economic rights disputes.*

*Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University Tegal.*

***Keywords: Copyright, Royalty, Joint Property, Legal Process***

# **MOTTO**

*Fa Inna Ma’al Usri Yusra*

*It Will Past*

*Crazy Dreams Take Crazy Effort*

# **PERSEMBAHAN**

Pertama-tama, dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, kekuatan, dan kemudahan yang tiada henti, sehingga saya dapat mencapai titik ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal yang penuh harapan dalam perjalanan saya meraih cita-cita di masa depan. Dengan ini, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Terima kasih untuk kedua orang tua saya tercinta, yang telah menciptakan keluarga yang hangat dan penuh kasih. Memberikan kepercayaan penuh kepada saya untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi apa yang saya inginkan. Memberikan doa-doa yang tidak pernah berhenti dan dukungan yang tiada henti mengiringi setiap perjalanan saya dalam menyelesaikan sala satu bagian terpenting dalam kehidupan saya, yaitu menjadi seorang sarjana. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk membuat papah dan mamah bahagia dan bangga, karna saya menyadari bahwa selama ini saya belum bisa berbuat yang lebih.
2. Terima kasih untuk adik-adik saya, Jidan Fahrur Rozi dan Azzalfa Mikayla Ayunindya yang senantiasa memberikan dukungan dan keceriaan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Selalu menjadi sumber semangat terutama di saat semua merasa melelahkan.
3. Terima kasih untuk sahabat yang saya sayangi Alya, Nabila, Nahda, Widia, Rahma, Aida, Devita, Dila, Nanda dan sahabat saya di luar kampus Nuke yang telah menjadi pendengar, memberikan support, ide dan perhatian yang tulus dalam proses pembuatan skripsi ini, serta membuat perjalanan ini menjadi lebih berarti dan penuh warna.
4. Terima kasih Kopi Kenangan yang telah menjadi tempat dan saksi dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Terima kasih untuk seseorang yang kehadirannya jauh disana, yang menjadi sumber motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan terus bertahan dalam meraih impian-impian saya.
6. Terima kasih teman-teman satu bimbingan atas bantuan, informasi, kerja sama, dan dukungan yang tulus.
7. Terima kasih untuk teman-teman seangkatan, seperjuangan saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Angkatan 2021.
8. Terima kasih untuk seluruh pihak terkait dalam proses pembuatan skripsi.
9. Terima kasih kepada seluruh member SEVENTEEN khususnya bias saya KIM MINGYU & CHOI SEUNGCHEOL, yang telah memberikan motivasi yang luar biasa untuk meraih kesuksesan. Melalui musik-musik indah yang kalian ciptaan, memberikan semangat dan menjadi teman sepi saya dalam penulisan skripsi ini.
10. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri untuk segala perjuangan, kesabaran, kekuatan, dan ketekunan yang telah di lalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Kamu hebat, saya bangga kamu bisa meyelesaikan perjalanan panjang ini, meskipun tak jarang air mata dan kegelisahan datang menghampiri. Berbahagialah dan bersinarlah di setiap langkah yang kamu ambil.

# **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **"Pembagian Hak Royalti Atas Karya Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Pencipta Lagu."**

Penulis merasa sangat bersyukur karena melalui penyusunan skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. Selain itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum., (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. Kus Riskiyanto, S.H., M.H., (Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
5. Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H., (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
6. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
7. Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H., (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Selviany, SE., M.H., (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1.
9. Segenap pegawai adiminstrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan penuh kesabaran dan ramah.
10. Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan dukungan baik moriil maupun materiil kepada penulis selama menempuh studi.
11. Rekan-rekan penulis, serta semua pihak yang memberikan motivasi selama menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembacanya.

Tegal, 6 Februari 2025

Penulis

Rossalina Citra Ayu

# **DAFTAR ISI**

[JUDUL i](#_Toc190117951)

[PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc190117952)

[PENGESAHAN iii](#_Toc190117953)

[PERNYATAAN iv](#_Toc190117954)

[ABSTRAK v](#_Toc190117955)

[*ABSTRACT* vi](#_Toc190117956)

[MOTTO vii](#_Toc190117957)

[PERSEMBAHAN viii](#_Toc190117958)

[KATA PENGANTAR x](#_Toc190117959)

[DAFTAR ISI xii](#_Toc190117960)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc190117961)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc190117963)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc190117964)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc190117965)

[D. Urgensi Penelitian 7](#_Toc190117966)

[E. Tinjauan Pustaka 8](#_Toc190117967)

[F. Metode Penelitian 10](#_Toc190117968)

[1. Jenis Penelitian 10](#_Toc190117969)

[2. Pendekatan Penelitian 11](#_Toc190117970)

[3. Data Penelitian 13](#_Toc190117971)

[4. Metode Pengumpulan Data 14](#_Toc190117972)

[5. Metode Analisis Data 15](#_Toc190117973)

[G. Sistematika Penulisan 15](#_Toc190117974)

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 17](#_Toc190117975)

[A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual 17](#_Toc190117977)

[1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 17](#_Toc190117978)

[2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 19](#_Toc190117979)

[3. Teori Dasar Perlindungan Kekayaan Intelektual 21](#_Toc190117980)

[B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta 22](#_Toc190117981)

[1. Pengertian Hak Cipta 22](#_Toc190117982)

[2. Subjek dan Objek Hak Cipta 25](#_Toc190117983)

[3. Hak yang Dimiliki Pencipta 29](#_Toc190117984)

[4. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta 33](#_Toc190117985)

[C. Tinjauan Umum Hak Cipta Lagu dan Musik 39](#_Toc190117986)

[D. Tinjauan Umum tentang Royalti 41](#_Toc190117987)

[E. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama 43](#_Toc190117988)

[1. Harta Bersama Dalam Hukum Positif Indonesia 43](#_Toc190117989)

[2. Harta Bersama Dalam Hukum Islam 45](#_Toc190117990)

[F. Tinjauan Umum tentang Perceraian 48](#_Toc190117991)

[1. Pengertian Perceraian 48](#_Toc190117992)

[2. Alasan Perceraian 51](#_Toc190117993)

[BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54](#_Toc190117994)

[A. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Royalti Atas Karya Lagu Sebagai Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta...........................................................................................................54](#_Toc190117996)

[B. Proses Hukum yang Dilakukan Dalam Pembagian Hak Royalti Atas Karya Lagu Setelah Perceraian 69](#_Toc190117997)

[BAB IV PENUTUP 86](#_Toc190117998)

[A. Kesimpulan 86](#_Toc190118000)

[B. Saran 88](#_Toc190118001)

[DAFTAR PUSTAKA 89](#_Toc190118002)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 94](#_Toc190118007)

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Kekayaan Intelektual (KI) berkembang sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi.[[1]](#footnote-2) *Intellectual Property Rights* atau biasa yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI)merupakan hak yang berasal dari hasil kreativitas intelektual untuk dinikmati secara ekonomis. Beberapa hak yang dapat diberikan antara lain hak untuk memiliki, hak untuk menggunakan dan melarang penggunaan ide atau informasi yang dimaksud.[[2]](#footnote-3) Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, bahwa sekarang di Indonesia hak kekayaan intelektual dibagi menjadi tujuh jenis yaitu Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Salah satu jenis HKI yang mendapatkan perlindungan hukum adalah Hak Cipta. Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1) mengatur hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[3]](#footnote-4) Hak eksklusif ini memiliki 2 (dua komponen) yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada penciptanya untuk melindungi karyanya dari orang lain. Sementara hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atas ciptaannya melalui perolehan pembayaran dari pihak lain yang menggunakan karyanya.[[4]](#footnote-5)

Hak cipta melindungi berbagai karya cipta manusia termasuk lagu dan musik. Hak kekayaan intelektual yang ada dalam lagu/musik lahir dari seorang pencipta atau pemegang hak cipta. Misalnya, dalam merancang lagu pencipta harus memiliki suatu ide/gagasan dari imajinasinya yang berhubungan dengan tema yang ingin disampaikan melalui publik yang berbentuk lirik, syair, ataupun instrumentasi musik. Dengan demikian, hak cipta lagu dan musik memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada penciptanya, memberikan mereka hak eksklusif untuk mengontrol dan memanfaatkan karya mereka, serta mengakui nilai ekonomi dan budaya dari karya tersebut.

Hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta digunakan untuk memberikan keuntungan ekonomis berupa hak royalti apabila digunakan atau dikomersialisasikan oleh pihak lain. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP Royalti Musik).[[5]](#footnote-6) Definisi royalti berdasarkan PP Royalti Musik tersebut yaitu sebagai bentuk kompensasi yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak cipta atas penggunaan ciptaannya atau karyanya. Hak ini bersifat eksklusif, karena tidak semua pihak dapat memiliki royalti secara bebas, kepemilikan royalti hanya dapat dimiliki oleh perseorangan yaitu pencipta, pemilik hak terkait atau pemegang lisensi. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pencipta dan memastikan bahwa mereka mendapatkan imbalan yang adil atas karyanya.

Bagi seorang seniman sekaligus pencipta yang sudah terikat dalam perkawinan pun tidak terlepas dari sebuah perselisihan. Adanya perselisihan mengakibatkan terjadinya permasalahan antara pasangan suami dan istri sehingga timbul suatu ketidakselarasan dalam pernikahan. Ketika perselisihan itu terjadi dan tidak menemukan jalan keluarnya maka perceraian menjadi jalan akhir dari penyelesaian permasalahan. Namun seiring dengan berjalannya waktu perceraian itu juga dapat menimbulkan masalah baru seperti permasalahan mengenai harta bersama (gono-gini), yang juga akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Pada prinsipnya, ketika perkawinan ini putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka bagi yang beragama islam berlaku ketentuan pembagian harta bersama menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagi yang beragama selain islam, dapat tunduk pada ketentuan dalam Pasal 128 KUH Perdata. Berdasarkan hukum islam, pembagian harta bersama atau yang disebut sebagai harta gono-gini setelah perceraian didasarkan pada asas keadilan dan proposionalitas, di mana dalam pembagian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak.

Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan prinsip kesatuan harta dalam perkawinan. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f KHI secara tegas menyebutkan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan, baik dari hasil kerja, bisnis, maupun warisan yang diterima bersama, menjadi milik bersama suami-istri. Secara detail konsep harta bersama tertuang dalam Pasal 91 KHI, bahwa selain berupa benda berwujud, harta bersama juga dapat berupa benda tidak berwujud salah satu contohnya adalah hak kekayaan intelektual.[[6]](#footnote-7) Dalam perceraian pembagian harta bersama dapat dibagi menjadi seperdua atau setengah harta bersama selama perkawinan berlangsung, hal ini merujuk pada ketentuan KHI Pasal 97.

Sementara itu, pembagian harta bersama setelah perceraian selain agama islam diatur dalam KUH Perdata Pasal 128 di mana pembagian harta bersama dilakukan dengan cara dibagi secara rata atau dibagi dua masing-masing pihak tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. KUH Perdata juga menganut sistem persatuan harta secara bulat, di mana semua harta yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan menjadi satu kesatuan, kecuali ada perjanjian yang menetapkan sebaliknya, hal tersebut dirujuk dari Pasal 121.

Berkaitan dengan pembahasan diatas, terdapat isu yang menarik perhatian publik beberapa waktu lalu mengenai perceraian pasangan publik figur seorang penyanyi Virgoun dan Innara Rusli terkait royalti yang dijadikan sebagai objek harta bersama dari lagu-lagu yang dihasilkan selama perkawinannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya yang dihasilkan selama perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama, sehingga pembagian hak royalti menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas. Kasus ini dimulai dengan Innara Rusli yang berperan sebagai penggugat kepada Virgoun sebagai tergugat. Dalam gugatan cerai, terdapat poin yang mengajukan pembagian harta bersama berupa harta tidak berwujud berupa royalti atas lagu ciptaan Virgoun. Lagu-lagu tersebut seperti “Surat Cinta Untuk Starla”, “Bukti”, “Orang yang Sama”, “Saat Kau Telah Mengerti”. Kemudian, pada tanggal 10 November 2023, Majelis Hakim PA Jakarta Barat memutuskan gugatan tersebut dengan Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB yang menetapkan bahwa Virgoun dan Inara akan menerima royalti masing-masing 50%.[[7]](#footnote-8)

Dengan demikian, maka diperlukan analisis hukum yang mendalam mengenai konsep royalti dalam konteks hukum perdata Indonesia yang menjadi krusial untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum mengenai topik royalti dalam sengketa harta bersama yang kemudian penulis jadikan sebagai judul skripsi yaitu: **“PEMBAGIAN HAK ROYALTI ATAS KARYA LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN PENCIPTA LAGU”.**

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak royalti atas karya lagu sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana proses hukum yang dilakukan dalam pembagian hak royalti atas karya lagu setelah perceraian?

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai hak royalti atas karya lagu sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengkaji proses hukum yang dilakukan dalam pembagian hak royalti atas karya lagu setelah perceraian.

## **Urgensi Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahun dan pemahaman yang lebih baik dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum hak cipta dan hukum perkawinan terhadap pembagian hak royalti lagu/musik sebagai harta bersama dalam perceraian. Kemudian dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bahan hukum bagi para akademis, peneliti, dan praktisi di masa yang akan datang. Seperti pada penelitian ini menggunakan 2 teori yaitu yang pertama dari David I Bainbridge, yang menggambarkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu hak yang lahir dari kreativitas intelektual manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya yang menghasilkan manfaat untuk mendukung kehidupan.[[8]](#footnote-9) Dan kedua teori monistisme modern *(the modern monistism theory)* yang dikemukakan oleh Ulmer dan Schricker dari Jerman, bahwa aspek kepribadian dan ekonomi hak milik intelektual merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang sama-sama mendapatkan perlindungan hukum.[[9]](#footnote-10)

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi penting bagi seniman, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam menambah pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pembagian hak royalti lagu/musik sebagai harta bersama dalam perceraian.

## **Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang membahas mengenai pembagian hak royalti dalam perceraian sudah ada beberapa yang ditulis. Untuk menunjukan posisi penelitian ini dengan penelitian yang sudah ditulis oleh penulis lain, berikut penulis deskripsikan 3 (tiga) penelitian yang terkait :

1. Muhammad Frengki (2024) “Analisis Yuridis Terhadap Royalti Atas Karya Seni Musik Sebagai Objek Harta Bersama Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya 2024. Skripsi ini memaparkan tentang kebolehan royalti atas karya seni musik sebagai objek harta bersama. Skripsi ini berawal dari kasus perceraian seorang musisi yang bernama Virgoun dengan istrinya Innara, di mana dalam gugatan perceraian tersebut Innara menuntut royalti atas karya seni musik yang telah dihasilkan selama perkawinan untuk dijadikan sebagai objek hukum harta bersama. Perbedaannya pada penelitian Muhammad Frengki lebih fokus mengkaji aspek kebendaan dari royalti atas karya seni musik secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian penulis, lebih berfokus mengkaji pada putusan pengadilan mengenai pembagian royalti atas karya lagu sebagai harta bersama dalam perceraian Virgoun dan Innara berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta serta proses hukum yang sesuai dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Meski demikian, keduanya memiliki persamaan, yakni sama-sama membahas royalti atas karya lagu/musik sebagai harta bersama dan menggunakan metode penelitian hukum normatif .
2. Hanifah Indriyani Anhar (2024) yang dituangkan dalam jurnal artikel dengan judul “Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai.” Menjelaskan permasalahan yang timbul akibat perceraian yang salah satunya adalah mengenai pembagian harta bersama seperti royalti hak cipta lagu. Perbedaannya, pada penelitian Hanifah Indriyani Anhar mengkaji royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama secara umum serta tidak spesifik pada satu kasus terkait secara langsung. Sedangkan pada penelitian penulis, royalti hak cipta lagu dalam perceraian yang dikaji lebih khusus dengan adanya kasus dan putusannya serta berfokus berdasarkan pengaturan Undang-Undang Hak Cipta proses hukum penyelesaian sengketa hak cipta. Persamaannya, yaitu sama-sama membahas royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama dalam gugatan cerai.
3. Nayla Berlianti Puspadewi (2024) yang dituangkan dalam jurnal artikel dengan judul “Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB.” Jurnal artikel ini memaparkan royalti atas karya cipta lagu/musik sebagai harta bersama dalam sebuah perkara perceraian. Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan terkait peraturan pembagian royalti atas ciptaan berupa lagu/musik dan mekanisme pembagian royalti sebagai harta bersama yang didasari pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Perbedaannya pada penelitian Nayla Berlianti Puspadewi lebih berfokus pada pengaturan pembagian royalti sebagai harta bersama dalam hukum islam. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada pengaturan pembagian royalti sebagai harta bersama dalam Undang-Undang Hak Cipta serta proses hukum penyelesaian sengketa hak cipta. Persamaannya, yaitu sama-sama didasari pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

## **Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research.* Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data/dokumen dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan atau eksperimen langsung. Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji informasi hukum tertulisa yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta diperlukan dalam penelitian normatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum pada umumnya terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pertama, pendekatan hukum normatif, yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). Pendekatan hukum normatif mencakup *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan)*, Conseptual Approach* (Pendekatan Konseptual)*, Case Approach* (Pendekatan Kasus).
2. Kedua, ada pendekatan hukum terapan atau normatif-empiris, yaitu penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
3. Ketiga, pendekatan hukum empiris, yaitu meninjau permasalahan hukum sebagai realitas sosial maupun realitas kultural. Pendekatan hukum empiris mencakup *sociological approach, phenomenological approach, anthropological approach, political approach,* dan pendekatan yang terkait lainnya.[[10]](#footnote-11)

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan hukum normatif, yang memposisikan hukum sebagai landasan norma. Dalam konteks ini, norma mencakup asas-asas, kaidah, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka beberapa cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni:

1. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan),

Dalam pendekatan perundang-undangan, fokus utamanya adalah menganalisis keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya untuk memastikan konsistensi peraturan-peraturan tersebut.[[11]](#footnote-12)

1. *Case Approach* (Pendekatan Kasus).

Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari norma yang dapat diterapkan dengan melihat kasus yang terjadi di masyarakat. Dalam kasus ini, penulis menggunakan contoh perceraian pasangan selebriti Virgoun seorang musisi, dan istrinya Inara Rusli yang berkaitan dengan pembagian royalti sebagai harta bersama.[[12]](#footnote-13)

Pendekatan penelitian ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.[[13]](#footnote-14) Penelitian hukum normatif ini diharapkan dapat menjawab masalah hukum terkait pemahaman royalti sebagai harta bersama dan tindakan hukum yang dapat ditempuh pihak royalti jika perceraian terjadi.[[14]](#footnote-15)

1. Data Penelitian
2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan atau dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat negara yang memiliki otoritas untuk membuat hukum menurut sistem lokal mereka. Misalnya dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer sebagai berikut :

* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
* Kompilasi Hukum Islam (KHI)
* Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang akan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen, jurnal, buku, artikel, ataupun hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Untuk memvalidasi dan realibilitas bahan-bahan hukum tersebut penulis yaitu menggunakan berbagai sumber hukum baik primer maupun sekunder yang saling melengkapi, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum untuk memvalidasi interpretasi hukum. Kemudian sumber-sumber hukum tersebut akan dicantumkan dalam penelitian berupa teori, konsep dan peraturan hukum yang relevan. Seperti melakukan kajian konseptual perundang-undangan dan doktrin dari para ahli.[[15]](#footnote-16)

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[[16]](#footnote-17) Pada dasarnya studi kepustakaan ini merujuk pada penelaahan, pengkajian, dan analisis data yang berkaitan dengan topik penelitian.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang merupakan jenis penelitian deskriptif, yang biasanya lebih cenderung menggunakan analisis data dan bahan yang digunakan. Dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan.[[17]](#footnote-18)

## **Sistematika Penulisan**

Penulis membuat rencana penulisan sistematis untuk skripsi ini, yang dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa subbab. Terdapat 4 (empat) bab yang yang setiap bab berisi uraian menyeluruh tentang topik yang akan dibahas dalam skripsi.

Pada Bab Pertama, digunakan sebagai pengembangan dari proposal dan menberikan gambaran secara umum dan luas mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas saat menulis pembagian hak royalti atas karya lagu sebagai harta bersama dalam kasus perceraian virgoun dan innara. Dalam bab pertama atau yang disebut sebagai pendahuluan terdapat 7 (tujuh) subbab, yaitu Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Urgensi penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua, berisi uraian tentang tinjauan konseptual dari pembahasan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul. Terdapat 4 (empat) subbab yaitu Tinjaun Umum Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Umum Hak Cipta, Tinjauan Umum Hak Cipta Lagu dan Musik, Tinjauan Umum Royalti, Tinjauan Umum Harta Bersama, Tinjauan Umum Perceraian.

Pada Bab Ketiga, berisi uraian pembahasan rumusan masalah yang telah diolah, dianalisis, dan ditafsirkan. Terdapat 2 (dua) subbab yang disebutkan dalam rumusan masalah yaitu pembahasan pertama mengenai pengaturan hukum mengenai hak royalti atas karya lagu sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Dan pembahasan kedua mengenai proses hukum yang dilakukan dalam pembagian hak royalti atas karya lagu antara virgoun dan innara setelah perceraian.

Pada Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisi kristalisasi semua yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Terdapat 2 (dua) subbab yaitu simpulan dan saran atas pokok permasalahan yang dibahas.

# **BAB II**

# **TINJAUAN KONSEPTUAL**

## **Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual**

1. **Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

*Intellectual Property Rights* (IPR)atau yang biasa disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki definisi sebagai hak yang timbul dari hasil pemikiran otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.[[18]](#footnote-19) Dalam *World International Property Organization* (WIPO) suatu karya cipta pikiran berupa penemuan di bidang sastra dan karya seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan di dalam perdagangan disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Para ahli memiliki berbagai perspektif dalam mendefiniskan HKI. David I Bainbridge menggambarkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu hak yang berasal dari kreativitas intelektual manusia yang direalisasikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat bagi kehidupan.[[19]](#footnote-20) Dalam hal ini, karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta dilindungi sebagai aset komersial dalam hukum kekayaan intelektual. Sederhananya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Menurut Ketua Asosiasi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (APHKI), Prof. Dr. OK. Saidin mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak kebendaan *(property right)* yaitu hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan rasio manusia berupa penalaran dan emosional yang jika dipadukan menghasilkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Hasil kerjanya berupa benda-benda *immaterial* atau benda tidak berwujud. Menurutnya, tidak semua orang dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual karena tidak semua orang dapat melakukan kemampuan bekerja yang berasal dari kecerdasannya secara maksimal.[[20]](#footnote-21) Hasil kerja otak yang menghasilkan hak yang bersifat eksklusif, artinya hanya orang tertentu saja yang memiliki hak tersebut. Hak yang bersifat eksklusif ini digunakan sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan hukum atas hasil intelektualitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta dan seni, terutama ketika karya intelektual tersebut digunakan untuk tujuan komersial.

Hak Kekayaan Intelektual juga memiliki karakteristik sebagai hak privat dan hak eksklusif. Hak Kekayaan Intelektual termasuk sebagai hak privat *(private right)* yang mana seseorang bebas untuk mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak.[[21]](#footnote-22) Sedangkan hak eksklusif diterima kepada pencipta sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga dapat mendorong orang lain untuk mengembangkan lebih lanjut.[[22]](#footnote-23) Sementara menurut Prof. Achmad. Zen Umar Purba, konsep hak eksklusif atas Kekayaan Intelektual kepada pemegang hak adalah sebagai penghargaan yang sewajarnya atas kreativitas, pemikiran, dan upaya pencipta, inventor, pendesain.[[23]](#footnote-24) Perlindungan ini menjadi instrumen penting dalam menjaga hak-hak para pemilik karya intelektual sekaligus mendorong perkembangan inovasi di masyarakat.

1. **Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual dapat dibagai dua kategori, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri:

1. Hak Cipta, meliputi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2. Hak Kekayaan Industri, meliputi ciptaan di bidang teknologi dan desain:
3. Merek Dagang
4. Indikasi Geografis
5. Desain Industri
6. Paten
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
8. Rahasia Dagang
9. Varietas Tanaman

Perkembangan berikutnya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia membedakan Kekayaan Intelektual berdasarkan bentuk kepemilikannya. Berdasarkan bentuk kepemilikannya, Kekayaan Intelektual dibedakan atas:

1. Kekayaan Intelektual Komunal, merupakan hak yang dimiliki secara penuh oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Kekayaan intelektual jenis ini memiliki ciri khas sebagai hak kolektif masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang dapat dikelola bersama, dibagi, disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi.
2. Kekayaan Intelektual Personal, merupakan hak yang dimiliki sepenuhnya oleh perseorangan atau kelompok individu. Kepemilikan hak ini dapat diperoleh tanpa mengajukan permohonan kepada negara untuk mendapatkan hak monopoli dalam pemanfaatan ekonominya. Kekayaan intelektual jenis ini memiliki karakteristik berupa hak yang dimiliki individu atau badan hukum, bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, berbentuk produk, serat karyanya disusun dalam bentuk tertulis dan sistematis.[[24]](#footnote-25)

Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual mencakup bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan karya sastra. Salah satu karakteristik Hak Kekayaan Intelektual bukan melindungi benda tidak berwujud, tetapi melindungi hasil pemikiran atau ide kreatif manusia. Seperti yang dijelaskan oleh William Robert Cornish, bahwa perlindungan kekayaan intelektual ditujukan untuk ide dan informasi yang memiliki nilai ekonomi atau komersial[[25]](#footnote-26). Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual baru terwujud ketika kemampuan intelektual seseorang menghasilkan karya yang dapat dimanfaatkan oleh indera manusia, baik dalam bentuk visual, audio, tulisan, atau penggunaan praktis lainnya.

1. **Teori Dasar Perlindungan Kekayaan Intelektual**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual didasari oleh beberapa teori seperti teori *reward,* teori *recovery,* teori *incentive,* teori *risk.* Setiap teori ini memiliki landasan pemikiran yang berbeda dalam memberikan perlindungan terhadap karya intelektual.

1. Teori *reward* (penghargaan), menekankan bahwa pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan berhak memperoleh perlindungan dan penghargan atas upaya yang telah dicurahkan dalam menghasilkan suatu ciptaan.
2. Teori *recovery*, berpandangan bahwa pencipta atau penemu perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali investasi yang telah dikeluarkan dalam menghasilkan ciptaan atau penemuan baik berupa tenaga, waktu, dan biaya yang telah digunakan.
3. Teori *incentive* memandang pentingnya pemberian insentif untuk mendorong minat, upaya dan investasi dalam kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreativitas, sehingga insentif diperlukan sebagai pemicu keberlanjutan kegiatan-kegiatan penelitian yang menghasilkan inovasi baru.
4. Teori *risk* (risiko) memberikan perlindungan berdasarkan pertimbangan bahwa setiap karya intelektual mengandung risiko dalam proses penciptaannya, sehingga wajar jika diberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap kegiatan yang mengandung risiko tersebut.[[26]](#footnote-27)

## **Tinjauan Umum tentang Hak Cipta**

1. **Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh setiap manusia. Hak cipta pertama kali diatur secara internasional melalui Konvensi Bern pada tahun 1886, yang menetapkan pemberian hak cipta secara otomatis kepada karya cipta tanpa harus mendaftarkan karyanya. Hak eksklusif pencipta akan otomatis lahir ketika sebuah karya cipta telah dicetak dalam suatu media.[[27]](#footnote-28) Tujuan pemberian hak cipta untuk melindungi hak pencipta dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat salinan dari karya cipta yang sudah dibuatnya.

Pengaturan hak cipta di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dengan memperhatikan batasan yang sesuai ketentutan peraturan perundang-undangan. Suyud Margono selaku ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia menekankan bahwa Undang-Undang Hak Cipta mendefiniskan hak cipta sebagai hak khusus. Hal ini mencerminkan pemahaman undang-undang yang berpijak pada sifat khusus yang melekat pada pencipta atau pemilik hak tersebut yang berkaitan dengan perlunya pengakuan dan penghargaan atas usaha dan pengorbanan dalam mewujudkan suatu karya atau suatu ciptaan.[[28]](#footnote-29)

Pada hakikatnya, hak cipta merupakan hak eksklusif yang hanya dapat dimiliki oleh pencipta. Arti “eksklusif” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2014 yaitu hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Kalimat “tidak ada pihak lain” mempunyai arti yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan bahwa hanya pencipta saja yang dapat memperoleh hak tersebut. Inilah makna dari hak eksklusif.[[29]](#footnote-30) Hak eksklusif dari hak cipta ini lahir secara otomatis, sehingga perlindungan hukum atas suatu ciptaan lahir secara otomatis *(automatical protection).*

Sebagai konsekuensi dari hak cipta sebagai suatu hak eksklusif, maka setiap orang/badan usaha yang menggunakan karya cipta lagu atau melakukan kegiatan komersil, maka pihak tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya atau kepada pemegang hak ciptanya yang oleh pencipta diberi kuasa untuk melakukannya. Secara sederhana, hak cipta sebagai suatu hak eksklusif merupakan objek hukum yang bersifat *immateril* yang mempunyai hubungan dan kepentingan yang sangat erat dengan penciptanya serta keaslian ciptaannya.[[30]](#footnote-31)

Dalam hak cipta terdapat beberapa istilah penting yang sering digunakan:

* Pencipta adalah individu atau sekelompok orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang menghasilkan suatu ciptaan yang memiliki karakteristik khas dan personal.
* Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang tercipta dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata.
* Pemegang hak cipta adalah pencipta yang memiliki hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta termasuk pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut secara sah.
* Hak terkait adalah hak yang berhubungan dengan hak dan bersifat eksklusif bagi pelaku pertunjukkan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
* Royalti adalah kompensansi yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait.[[31]](#footnote-32)

1. **Subjek dan Objek Hak Cipta**
2. Subjek Hak Cipta

Dalam konteks hukum, subjek hukum hak cipta memiliki kesamaan dengan subjek hukum pada umumnya yaitu mencakup individu/orang dan badan hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 1 angka 2, menyebutnya sebagai pencipta, yaitu seorang atau sekelompok orang yang secara mandiri maupun bersama-sama untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki keunikan dan kepribadian tersendiri.[[32]](#footnote-33) Dari ketentuan tersebut, pencipta dapat berbentuk perorangan *(naturlijke persoon)* maupun badan hukum *(recht persoon).* Lebih luas lagi, subjek hak cipta juga mencakup negara dan instansi pemerintah untuk karya-karya tertentu.

Merujuk pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, status pencipta dilekatkan pada orang yang namanya tercantum dalam suatu karya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pengakuan sebagai pencipta tidak hanya terbatas pada pencantuman nama dalam suatu karya, tetapi juga mencakup nama yang: dinyatakan secara eksplisit sebagai pencipta pada suatu ciptaan; tercatat dalam surat dokukmen pencatatan ciptaan; dan terdaftar dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta;

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang karya kolaboratif yang melibatkan beberapa orang atau minimal dua orang. Dalam konteks ini, status pencipta diberikan kepada orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian yang terpisah. Namun ketika tidak ada pemimpin atau pengawas, maka status pencipta diberikan kepada orang yang menghimpun ciptaan dengan tetap memperhatikan hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. [[33]](#footnote-34)

Subjek hukum hak cipta tidak hanya mencakup pencipta karya, tetapi juga pemegang hak cipta yang terdiri atas tiga yakni, pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak penerima hak yang sah langsung dari pencipta, dan pihak lain yang menerima pengalihan hak dari pihak penerima hak yang sah. Dalam konteks hak cipta musik dan lagu, maka status hak cipta dipegang oleh pencipta musik atau lagu tersebut, yang dalam dunia musik dikenal dengan komposer.[[34]](#footnote-35)

1. Objek Hak Cipta

Objek utama dari hak cipta adalah ciptaan itu sendiri, yang didefinisikan sebagai hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya ini dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal tersebut selaras dengan pendapat Laurence John Taylor yang dalam bukunya *Copyright for Librarians* bahwa perlindungan hak cipta tidak ditujukan pada ide dasarnya, melainkan pada bagaimana ide tersebut diwujudkan. Dengan kata lain, suatu karya baru mendapat perlindungan hak cipta ketika sudah berbentuk karya nyata, bukan saat masih berupa konsep atau pemikiran semata.[[35]](#footnote-36)

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) No 28 Tahun 2014 ciptaan yang dilindungi mencakup berbagai kategori:

1. Karya Tulis: Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang di terbitkan, dan berbagai bentuk karya tulis lainnya.
2. Karya Lisan: Ceramah, materi perkuliahan, pidato dan ciptaan yang sejenis.
3. Karya Pendidikan: Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Karya Seni: Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, seni pertunjukan seperti drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
5. Karya Seni Rupa: Lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase, seni terapan, karya arsitektur, peta, seni batik dan motif tradisional.
6. Karya Visual dan Media: Fotografi, potret, sinematografi
7. Karya Derivatif: Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
8. **Hak yang Dimiliki Pencipta**

Hak cipta sebagai hak eksklusif memiliki karakteristik unik yang timbul secara otomatis *(automatical protection)* sejak suatu karya diciptakan. Hak eksklusif ini terdiri atas dua (2) komponen utama yaitu hak moral dan hak ekonomi:

1. Hak Moral *(Moral Right)*

Hak moral merupakan hak yang secara intrinsik melekat pada seorang pencipta yang memberikan perlindungan terhadap hubungan pribadi antara pencipta dengan karyanya. Hak ini bersifat personal untuk memperlihatkan identitas yang berkaitan dengan reputasi, integritas dan juga kemampuan yang hanya dimiliki oleh pencipta. Kemudian, bersifat tidak dapat dihapus atau dialihkan, meskipun hak cipta atau hak terkaitnya telah dialihkan kepada pihak lain. Dan bersifat kekal, berarti bahwa ciptaannya melekat pada pencipta selama hidupnya bahkan setelah penciptanya meninggal dunia.[[36]](#footnote-37) Dari ketiga karakteristik utama hak moral tersebut, dapat diketahui bahwa hak moral bertujuan untuk menjaga identitas, reputasi, dan integritas pencipta dalam karyanya.

Menurut Henry Soelistyo, sesuai rumusan *Article* 6bis Konvensi Berne, substansi hak moral meliput:

1. *The right to claim authorsip,* yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta dengan mencantumkan nama pencipta pada karya yang dihasilkan. Hak ini memberikan wewenang kepada seorang pencipta untuk secara terbuka menyatakan dirinya sebagai sumber asli dari suatu karya, serta untuk mencegah orang lain mengklaim kepemilikan atas karya tersebut
2. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work,* yaitu pencipta memiliki hak untuk mencegah dilakukan perubahan terhadap karyanya yang dapat merugikan reputasi atau martabat pencipta. Hak ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan keutuhan karya serta melindungi reputasi pencipta sebagai pencipta asli.
3. *The right to object other derogatory action in relation to the said work,* yaitu Pencipta memiliki hak untuk mencegah segala tindakan yang dapat merusak nama baik atau reputasinya terkait dengan karya ciptaannya. Ini termasuk tindakan yang merendahkan, menghina, atau menggunakan karya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud awal penciptaan.[[37]](#footnote-38)

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral mencakup hak atribusi dan hak integritas. Hak atribusi artinya pencipta dapat mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya, menggunakan nama samaran, serta memodifikasi ciptaannya dan judul ciptaannya. Sedangkan hak integritas memiliki arti bahwa pencipta memiliki hak untuk melindungi ciptaannya dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan reputasinya sebagai pencipta dengan menolak distorsi, mutilasi, modifikasi.[[38]](#footnote-39) Dengan demikian dari ketentuan tersebut, hak moral merupakan hak melekat abadi pada penciptanya dan tidak dapat dialihkan.

1. Hak Ekonomi *(Economic Right)*

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Sering juga disebut dengan hak eksploitasi, karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta.

Menurut Rooseno Harjowidigdo hak ekonomi pencipta atas ciptaannya dapat digolongkan menjadi 5 hak, meliputi:[[39]](#footnote-40)

1. Hak untuk mengumumkan

Hak mengumumkan artinya pencipta memiliki hak untuk menyampaikan suatu ciptaannya kepada orang lain atau masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik.

1. Hak untuk memperbanyak

Biasanya disebut *mechanical rights* yaitu pencipta dapat menggandakan karya rekaman suara atau gambar atau suara dan gambar.

1. Hak untuk menyewakan

Hak untuk menyewakan merupakan suatu konsekuensi dari hak eksklusif pencipta atas karya ciptanya. Artinya, pencipta atau pemegang hak cipta dapat melarang pihak lain yang menggunakan karya ciptanya tanpa izin pencipta namun pihak lain dapat menyewa karya ciptanya yang bertujuan untuk kepentingan komersial.

1. Hak untuk menjual

Pencipta memiliki hak untuk menjual karya ciptanya, namun sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta tersebut statusnya tetap berada di tangan pencipta dan tidak dapat berpindah kepada pembeli.

1. Hak untuk memberi lisensi

Pencipta atau pemegang hak cipta yang sah dapat memberikan lisensi kepada pihak lain mengenai penggunaan karya cipta, yang nantinya lisensi akan dibayarkan dalam bentuk royalti melalui lembaga manajemen kolektif.

Hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencakup hak penerbitan, hak penggandaan, hak penerjemahan, hak pengadaptasian, hak pendistribusian, hak pertunjukan, hak pengumuman, hak komunikasi, hak penyewaan. Setiap orang yang memanfaatkan hak ekonomi pencipta, wajib memperoleh izin pencipta atau pemegang hak ciptanya terlebih dahulu. Sehingga tidak diperkenankan bagi seseorang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan atau menggunakan secara komersial sebuah ciptaan.[[40]](#footnote-41)

### **Penyelesaian Sengketa Hak Cipta**

Suatu sengketa yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta dapat ditempuh berbagai jalur yang dapat dilihat dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian tersebut yakni:

1. Litigasi

Untuk jalur pengadilan (litigasi), proses ini dianggap *sebagai the last resort atau ultimatum remedium,* yaitu langkah terakhir yang ditempuh ketika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamanian di luar pengadilan tidak membuahkan hasil.[[41]](#footnote-42) Pengadilan yang berwenang menangani sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga, selain itu tidak ada pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang berada pada lingkup Peradilan Umum yang memiliki wewenang untuk menangani beberapa jenis perkara di antaranya mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hak Kekayaan Intelektual, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal ini, setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar, termasuk terkait kekayaan intelektual dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta telah ditentukan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan melalui beberapa tahapan, tahapan tersebut yaitu:

1. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. Permohonan tersebut didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarannya ditetapkan oleh pengadilan. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

1. Non Litigasi

Sementara itu, untuk penyelesaian jalur non litigasi atau APS sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 1 angka 10 didefinisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, penyelesaian di luar pengadilan seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Metode-metode dalam penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual dengan menggunakan Altenatif Penyelesaian Sengketa antara lain:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atas suatu masalah yang sedang berlangsung.[[42]](#footnote-43) Negosiasi merupakan metode penyelesaian yang paling sederhana, di mana para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang berselisih tanpa adanya pihak ketiga.

1. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang memiliki beberapa keuntungan seperti proses lebih cepat, biaya lebih murah, dan hasil yang win-win solution. Dalam mediasi terdapat pihak netral yang memfasilitasi diskusi untuk mencapai kesepakatan yang disebut sebagai mediator.[[43]](#footnote-44) Penunjukan mediator dapat dilakukan melalui dua cara. Jika mediasi dilakukan dalam proses pengadilan niaga, mediator akan ditunjuk oleh pengadilan. Namun, jika mediasi dilakukan di luar pengadilan, pihak-pihak dapat memilih mediator profesional secara independen, seperti dari Pusat Mediasi Nasional atau lembaga lain yang relevan.

Mediator dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual memiliki kualifikasi khusus seperti pada kasus ini, mediator bisa seorang ahli hukum, konsultan kekayaan intelektual atau pakar di bidang musik dan hak cipta. Jika tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat melanjutkan penyelesaian ke Pengadilan Niaga untuk keputusan hukum yang mengikat.

1. Konsiliasi

Konsiliasi pada hakekatnya memiliki kesamaan dengan mediasi yaitu terdapat pihak ketiga yang disebut sebagai konsiliator. Konsiliator dalam hal ini tidak hanya memfasilitasi dialog, namun juga dapat memberikan saran atau rekomendasi penyelesaian sengketa kepada para pihak. Konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam mencari solusi dibandingkan mediator.[[44]](#footnote-45)

1. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mendefiniskan arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).[[45]](#footnote-46)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga hal yang dikemukakan mengenai arbitrase:

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Dalam menjatuhkan putusan arbitrase, arbiter diberikan jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika putusan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut.

Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir *(final)* dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua Pengadilan Negeri diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Setiap metode dalam alternatif penyelesaian sengketa memiliki kelebihan masing-masing, dan pemilihan metode bergantung pada jenis sengketa serta kesepakatan para pihak yang terlibat. Selain itu, faktor seperti tingkat kerumitan kasus, waktu penyelesaian, biaya yang dikeluarkan, serta keinginan untuk menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan metode penyelesaian yang paling tepat.

## **Tinjauan Umum Hak Cipta Lagu dan Musik**

Dalam konteks kesenian, musik dan lagu memiliki definisi yang berbeda namun saling berkaitan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik didefinisikan sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Musik juga dapat dipahami sebagai rangkaian nada atau suara yang dihasilkan melalui berbagai instrume. Sementara itu, lagu didefinisikan sebagai rangkaian suara berirama yang diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti percakapan, nyanyian, bacaan, dan lain-lain. Kedua elemen ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan satu sama lain.[[46]](#footnote-47)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak memberikan definisi khusus mengenai hak cipta lagu dan/atau musik. Namun, dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d) UU Nomor 28 Tahun 2014, mengatur bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya yang bersifat utuh. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuik notasinya. Komponen tersebut membentuk satu kesatuan karya cipta yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya.[[47]](#footnote-48)

Perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas dan keahlian sehingga ciptaan tersebut dapat dibaca dan didengar. Pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik menjadi bagian penting dari kerangka hukum di indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kreatif para pencipta, komposer, penulis lirik, dan pemilik hak cipta lainnya di industri musik.[[48]](#footnote-49)

## **Tinjauan Umum tentang Royalti**

Dalam penggunaan lisensi lagu dan/atau musik, penerima lisensi memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah dana kepada pemberi lisensi yang dikenal dengan istilah royalti *(lisensi fee)*.[[49]](#footnote-50) Menurut *Legal Dictionary*, royalti didefinisikan sebagai pembayaran berdasarkan presentase dari pendapatan kotor atau bersih atau nominal tetap dari setiap penjualan yang menjadi hak pencipta atas suatu ciptaan yang ditentukan. Besaran ini ditetapkan melalui perjanjian antara berbagai pihak seperti produsen, penerbit, distributor dengan para pencipta, penulis, pembuat film, penulis naskah, komposer musik, musisi, dan pencipta lainnya.[[50]](#footnote-51)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya Pasal 1 Angka 21, mendefinisikan royalti sebagai kompensansi atas pemanfaatan hak ekonomi suatu karya atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pembayaran royalti didasarkan pada persentase yang telah disepakati dari pendapatan yang diperoleh melalui kepemilikan atau melalui cara lain. Mengingat lagu dan musik merupakan karya intelektual yang dilindungi secara hukum, pembayaran royalti menjadi sebuah kewajiban. Untuk mengelola hak ekonomi mereka, pencipta harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK membantu pencipta dalam menyebarkan, mendistribusikan, dan mengelola karya cipta dan royaltinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, penggunaan komersial karya dalam pertunjukan dapat dilakukan tanpa harus meminta izin dari pencipta dengan syarat mereka harus membayar royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Jika Undang-Undang Hak Cipta berfokus untuk melindungi hak cipta musik dan lagu, maka pengelolaan royalti hak cipta bertujuan untuk melindungi kepentingan pencipta lagu atau musik, pemegang hak cipta, dan pemilik hak ekonomi terkait, serta siapapun yang menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan.[[51]](#footnote-52)

Dari uraian tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa royalti merupakan bentuk kompensansi berupa sejumlah uang kepada pencipta atas suatu ciptaannya yang digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dengan izin dari pencipta tersebut.

## **Tinjauan Umum tentang Harta Bersama**

1. **Harta Bersama Dalam Hukum Positif Indonesia**

Harta bersama menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu harta yang diperoleh bersama selama ikatan perkawinan.[[52]](#footnote-53) Di Indonesia, ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam tiga instrumen hukum yang berbeda, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalaui Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.[[53]](#footnote-54)

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 119 KUH Perdata mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Sehingga harta tersebut secara otomatis menjadi kesatuan harta suami dan istri, kecuali terdapat ketentuan lain yang disepakati dalam perjanjian perkawinan. Selama masa perkawinan, harta bersama tidak boleh dihapuskan atau diubah melalui kesepakatan antara suami istri.[[54]](#footnote-55) Ketika perkawinan berakhir karena perceraian berdasarkan Pasal 128 ayat (1) masing-masing suami istri berhak separuh bagian atas harta bersama tanpa memandang asal-usul barang-barang tersebut.[[55]](#footnote-56)

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UUP)

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) membatasi harta bersama hanya harta yang diperoleh selama perkawinan. Artinya harta kekayaan yang dimiliki sebelum terjadinya perkawinan tidak dianggap sebagai harta bersama, melainkan termasuk harta bawaan seperti harta yang diperoleh oleh dari warisan atau hadiah pihak ketiga kepada salah satu pihak.[[56]](#footnote-57) Apabila perkawinan berakhir karena perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 37.[[57]](#footnote-58)

1. Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 85 keberadaan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menghilangkan kemungkinan adanya kepemilikan pribadi oleh suami atau istri. Hal ini berarti tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Dalam KHI, harta bersama dibedakan menjadi benda berwujud atau tidak berwujud. Kemudian, ketika terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan Pasal 97.

Berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan, Subekti menjelaskan bahwa KUH Perdata menganut asas “persatuan bulat” harta perkawinan (*algehele gemeenschap).* Maksud dari asas tersebut bahwa setiap harta yang dihasilkan dalam perkawinan baik oleh suami, istri, atau suami dan istri menjadi harta bersama di antara mereka. Hal ini berakibat perolehan atau penghasilan yang kemudian digunakan harta-harta demi hukum menjadi harta bersama dengan tanpa mempersoalkan atas nama siapa barang atau harta tersebut. Kondisi ini hanya dapat dikecualikan melalui suatu perjanjian perkawinan.

Pembubaran harta bersama terjadi ketika percampuran harta tidak dapat berlanjut lagi karena adanya hal-hal tersebut. Meskipun terjadi pembubaran, status harta-harta yang sebelumnya telah bercampur menjadi harta bersama tetap diakui sebagai milik kedua belah pihak. Setelah pembubaran tersebut, setiap pihak memiliki hak untuk mendapatkan pembagian yang setara yaitu masing-masing memperoleh setengah bagian harta bersama.

1. **Harta Bersama Dalam Hukum Islam**

Dalam Islam, pada dasarnya tidak mengenal konsep percampuran harta kekayaan antara suami dan istri dalam perkawinan, karena baik Al-Qur’an maupun Hadits tidak memuat ketentuan mengenai harta bersama. Konsep harta bersama awalnya berasal dari tradisi masyarakat Indonesia yang yang kemudian diadaptasi serta diakui oleh hukum islam dan hukum positif Indonesia.

Ketika terjadi perceraian, penyelesaian pembagian harta bersama dalam hukum islam dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan. Meski demikian, hukum islam tetap memandang bahwa perkawinan tidak secara otomatis menciptakan percampuran harta bersama antara suami istri, kecuali jika ada *syirkah* (perjanjian dalam perkawinan). *Syirkah* sendiri didefinisikan sebagai kesepakatan antara para pihak untuk berkongsi dalam dalam hal permodalan dan pembagian keuntungan.[[58]](#footnote-59)

Menurut M. Yahya Harahap, pandangan hukum Islam mengenai harta bersama selaras dengan yang disampaikan oleh Ismail Muhammad Syah, bahwa pencarian bersama suami istri seharusnya masuk dalam *rub’u mu’amalah,* meskipun hal ini tidak dibahas secara khusus. Karena sebagian besar penulis kitab fikih merupakan orang arab yang tidak mengenal adat pencarian bersama suami istri. Namun, konsep perkongsian atau syirkah tetap diakui, sehingga pencarian bersama suami istri termasuk dalam kategori syirkah.

Dalam konteks perkawinan, harta bersama digolongkan dalam bentuk *syarikat abdan* dan *mufawadlah*. *Syarikat abdan* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga mereka, di mana hasil dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai perjanjian yang telah mereka buat. *Syarikat mufawadlah* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan pekerjaan dengan tenaga dan modal yang masing-masing mereka keluarkan, di mana keuntungan diperoleh dari kontribusi tenaga dan modal tersebut, dan masing-masing pihak dapat melakukan tindakan tanpa persetujuan pihak lain. Berdasarkan konsep-konsep tersebut, para pakar hukum islam di Indonesia sepakat untuk menggunakan *syarikat abdan* sebagai dasar dalam merumuskan aturan tentang harta bersama suami istri dalam Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun hukum islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi suami istri menjadi harta bersama, tetap dianjurkan bagi pasangan untuk saling pengertian dalam mengelola harta pribadi masing-masing. Jika ada kekhawatiran munculnya permasalahan di kemudian hari, hukum islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. [[59]](#footnote-60)

## **Tinjauan Umum tentang Perceraian**

1. **Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berasala dari kata “cerai” yang berarti “pisah”. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menjelaskan secara khusus mengenai perceraian, sehingga muncul interpretasi dari para ahli hukum. Seperti yang disampaikan oleh :

1. A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain.[[60]](#footnote-61)
2. Soemiyati mendefinisikan perceraian sebagai putusnya perkawinan melalui putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak, baik suami atau istri berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Subekti mengemukakan bahwa perceraian ialah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.[[61]](#footnote-62)

Pengertian perceraian sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 didefinsikan sebagaia pernyataan resmi seorang suami untuk mengakhiri perkawinannya, yang kemudian harus diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Pernyataan ini menjadi salah satu cara yang sah untuk memutuskan ikatan perkawinan. Maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendak salah satu pihak atau karena adanya putusan pengadilan.

Dalam perspektif hukum, perceraian dapat dipahami dalam dua konteks:

1. Perceraian menurut hukum islam, yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 dan Pasal 39 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian terbagi menjadi:
2. Cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama atas inisiatifnya sendiri. Perceraian ini resmi berlaku sejak ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Selaras dengan pendapat Az-Zuhaili bahwa talak diartikan sebagai terlepasnya suatu ikatan perkawinan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan perkawinan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.[[62]](#footnote-63)
3. Cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh kepada Pengadilan Agama atas inisiatifnya. Perceraian ini resmi berlaku sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan oleh suami yang dilakukan di depan Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.[[63]](#footnote-64)

1. Perceraian menurut hukum agama non-islam, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu peceraian yang diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan Negeri. Perceraian ini dianggap sah sejak pendaftarannya tercatat oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.[[64]](#footnote-65)

Berkaitan dengan pasal di atas, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa meskipun perceraian pada dasarnya merupakan masalah pribadi pasangan suami istri dan bisa terjadi atas keinginan salah satu pihak, proses perceraian tetap harus dilakukan melalui lembaga peradilan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam perceraian, khususnya dari pihak suami dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.[[65]](#footnote-66)

1. **Alasan Perceraian**

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam Pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Zina, yaitu hubungan seksual yang dilakukan secara sadar dan sukarela oleh orang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Tindakan ini dilakukan tanpa paksaan, hipnotis, atau oleh orang dengan gangguan mental.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama, berdasarkan Pasal 211 KUH Perdata jika salah satu pasangan meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, gugatan perceraian baru dapat diajukan setelah 5 tahun berlalu. Namun, gugatan batal jika pasangan tersebut kembali sesuai dengan Pasal 218 KUH Perdarta dan jika kemudian pergi lagi tanpa alasan yang sah, gugatan baru dapat diajukan setelah 6 bulan dari kepergiannya.
3. Hukuman penjara, jika salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah pernikahan, dan pihak lainnya dapat mengajukan perceraian. Hal ini bukan hanya karena hukuman penjaranya, tetapi karena dampak dari hukuman tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga.
4. Kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan atau luka berat yang dilakukan oleh pasangan dapat menjadi alasan perceraian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 5 melarang berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelataran rumah tangga.[[66]](#footnote-67)

Sementara pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya Pasal 39 menyatakan bahwa perceraian tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan sepihak. Hakim akan mengabulkan perceraian jika terdapat alasan yang cukup kuat. Rincian alasan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tepatnya Pasal 19, yaitu ketika salah satu pihak:

1. Berperilaku buruk seperti: berzina, kecanduan alkohol, atau judi yang sulit diperbaiki,
2. Meninggalkan pasangan tanpa izin dan alasan yang sah selama minimal 2 tahun berturut-turut,
3. Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah menikah,
4. Melakukan penganiayaan atau kekejaman yang membahayakan pasangan,
5. Mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghalangi pemenuhan kewajiban suami/istri,
6. Konflik terus menerus antara suami istri tanpa ada harapan hidup bahagia.

Alasan-alasan tersebut yang menjadi dasar pengajuan perceraian baik pada satu alasan saja atau kombinasi dari beberapa alasan. Kemudian alasan tersebut yang nantinya akan diperiksa kebenarannya oleh majelis hakim dalam proses persidangan.

1. Nayla Berlianti Puspadewi, “Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622./PDT.G/2023.PA.JB”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP),* 4 (4), Mei 2024, hlm. 897. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4> [↑](#footnote-ref-2)
2. Abd Thalib, *et.al., Hak Kekayaan Intelektual Indonesia,* Depok: Rajawali Pers, 2018, Cet. Ke-1, hlm. 20-21.

   <https://repository.uir.ac.id/1526/1/Hak%20Kekayaan%20Intelektual%20Final%20%20%20140218.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
3. Sulthon Miladiyanto, “Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik”, *Rechtldee Jurnal Hukum,* 10 (1), Juni, 2015, hlm. 2. <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1136> [↑](#footnote-ref-4)
4. Racmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual,* Jakarta: Kencana, 2021, Cet ke-1, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dewi Rinjani, *et.al.,* “Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA.JB”, *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1 (3), Juli 2024, hlm. 265. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.340> [↑](#footnote-ref-6)
6. Hanifah Indriyani Anhar, Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum,* 4 (1), Januari 2024, hlm. 91. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.101> [↑](#footnote-ref-7)
7. Nayla Berlianti Puspadewi, *op.cit.*, hlm. 898. [↑](#footnote-ref-8)
8. David Bainbridge, *Intellectual Property,* England: Pitman Publishing, 2010, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-9)
9. Racmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-10)
10. Achmad Irwan Hamzani, *et.al., Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum,* Tegal: BAN-PT, 2023, hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-11)
11. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 133. [↑](#footnote-ref-12)
12. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 133. [↑](#footnote-ref-13)
13. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-14)
14. Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,* Yogyakarta: Mirra Buana, 2023, hlm. 103. [↑](#footnote-ref-15)
15. Andarusni Alfansyur, Mariyani, Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial, *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah,* 5 (2), 2020, hlm. 149. [↑](#footnote-ref-16)
16. Bachtiar, *Mendesaian Penelitian Hukum,* Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 113. [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian,* Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), Cet. Ke-1, September 2021, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-18)
18. 17 Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,* Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, Cet. ke-1, hlm. 10. <https://books.google.co.id/books?id=9WuVEAAAQBAJ&dq=hak+kekayaan+intelektual&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s> [↑](#footnote-ref-19)
19. David Bainbridge, *op.cit.,* hlm. 3. [↑](#footnote-ref-20)
20. OK. Saidin, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-21)
21. Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-22)
22. Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar,* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, Cet. ke-1, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-23)
23. Firqoh Nazia, *et.al.,* Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Ekonomi Kreatif, Pekalongan: NEM, 2023, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-24)
24. Rachmadi Usman, *op.cit.,* hlm. 9. [↑](#footnote-ref-25)
25. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual “Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia”,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-4, 2014, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-26)
26. Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang,* Pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-27)
27. Iswi Hariyani, *et.al., Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, hlm. 36. [↑](#footnote-ref-28)
28. Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta,* Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-29)
29. Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-30)
30. Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi),* Jakarta: UKI Press, 2017, hlm. 74. <http://repository.uki.ac.id/1480/8/PERFORMINGRIGHTHAKCIPTAATASKARYAMUSIK.pdf> [↑](#footnote-ref-31)
31. Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,* Jakarta: Kencana, 2020, Cet. Ke-1, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-32)
32. Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (jilid I),* Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015, Cet. ke-1, hlm. 13. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ffG7CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=ruang+lingkup+hak+kekayaan+intelektual&ots=nbO-q0bJCJ&sig=FKRX9_waqL4V3BcrMn4vUYQU6wU&redir_esc=y#v=onepage&q=ruang%20lingkup%20hak%20kekayaan%20intelektual&f=false> [↑](#footnote-ref-33)
33. OK. Saidin, *op.cit.,* hlm. 59-60. [↑](#footnote-ref-34)
34. Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, *op.cit.,* hlm.86. [↑](#footnote-ref-35)
35. Rachmadi Usman, *op.cit.,* hlm.121. [↑](#footnote-ref-36)
36. Iswi Hariyani, *op.cit.,* hlm. 41. [↑](#footnote-ref-37)
37. Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 105-106. [↑](#footnote-ref-38)
38. Rachmadi Usman, *op.cit.,* hlm. 70. [↑](#footnote-ref-39)
39. Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman,* Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, Cet. ke-1, 2005, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-40)
40. Rachmadi Usman, *op.cit.,* hlm. 72. [↑](#footnote-ref-41)
41. Stanley Owen, *et.al.,* Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Anthology: Inside Intellectual Property Rights,* Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 323. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology> [↑](#footnote-ref-42)
42. Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Jakarta: Kencana, 2019,hlm. 20. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tKbJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=alternatif+penyelesaian+sengketa&ots=kjJERmJmJ1&sig=r8ZE3izmS5g2X-gqhzkvJHYWaXo&redir_esc=y#v=onepage&q=alternatif%20penyelesaian%20sengketa&f=false> [↑](#footnote-ref-43)
43. *ibid,* hlm. 24. [↑](#footnote-ref-44)
44. Gatot P. Soemartono, Suyud Margono, *Arbitrase Mediasi dan Negosiasi*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017, hlm. 1.9.

    <https://repository.ut.ac.id/4132/1/HKUM4409-M1.pdf> [↑](#footnote-ref-45)
45. Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 73. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=J9q2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=penyelesaian+arbitrase&ots=_BgBvWCutH&sig=cuAlznysTtViCHZ_hXkbtZsEC5Y&redir_esc=y#v=onepage&q=penyelesaian%20arbitrase&f=false> [↑](#footnote-ref-46)
46. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 602. [↑](#footnote-ref-47)
47. Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, *op.cit.,* hlm. 119. [↑](#footnote-ref-48)
48. Raihana, *et.al.,* Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu), *INNOVATIVE: Journal Of Science Research,* 3 (5), 2023, hlm. 7865. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative> [↑](#footnote-ref-49)
49. Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, *op.cit.,* hlm.89. [↑](#footnote-ref-50)
50. Legal Dictionary, *Legal Terms and Definition,* [Legal Dictionary | Law.com](https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1870), Diakses pada tanggal 04 November 2024, Pukul 12.49 WIB. [↑](#footnote-ref-51)
51. Tommy Hottua Marbun, *et.al.,* Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler, *Jurnal Hukum Ekonomi,* 1 (1), 2013, hlm. 3. <https://www.neliti.com/id/publications/14693/perlindungan-hukum-hak-cipta-terhadap-karya-cipta-lagu-dan-musik-dalam-bentuk-ri> [↑](#footnote-ref-52)
52. Tim Penyusun, *Kamus Bahas Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 512. [↑](#footnote-ref-53)
53. M. Natsir Asnawi, *Antologi Hukum Perdata,* Yogyakarta: Phoenix, 2018, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-54)
54. M. Natsir Asnawi, *Perbandingan Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum,* Jakarta: Prenada Media, 2022, hlm. 40. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9ZVdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=harta+bersama&ots=KPX4wE2UIl&sig=vTUfwjCM5x0ig2fiQi912VnJD2Y&redir_esc=y#v=onepage&q=harta%20bersama&f=false> [↑](#footnote-ref-55)
55. *Ibid.,* hlm. 42*.* [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid.,* hlm.47. [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid.,* hlm. 59. [↑](#footnote-ref-58)
58. Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila,* Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020, hlm. 110.

    <http://repository.untag-smd.ac.id/184/1/Pembagian%20Harta%20Bersama_Esti%20Royani.pdf> [↑](#footnote-ref-59)
59. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, Cet. Ke-5, 2017, hlm. 111-112. [↑](#footnote-ref-60)
60. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian,* Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020, hlm. 161. <https://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Perceraian.pdf> [↑](#footnote-ref-61)
61. Esti Royani, *op.cit.,* hlm. 15. [↑](#footnote-ref-62)
62. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, hlm. 318. [↑](#footnote-ref-63)
63. Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-64)
64. Muhammad Syaifuddin, *et.al.,* *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 19-20. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Y3GCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perceraian&ots=706P7gpYfG&sig=oOfIF5tBtGO39-MDdVIx0XtSfpY&redir_esc=y#v=onepage&q=perceraian&f=false> [↑](#footnote-ref-65)
65. Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006, hlm.110-111. [↑](#footnote-ref-66)
66. Khoirul Abror, *op.cit.,* hlm. 207-208. [↑](#footnote-ref-67)